



Pengantar HUKUM PIDANA

Oleh:

Joeni Arianto Kurniawan, S. H.

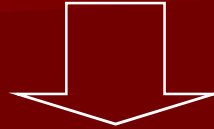
Pengantar Hukum Pidana
Joeni Arianto Kurniawan, S.H.

Latar Belakang & Hakekat Hukum Pidana:



■ Sehingga:

Demi ketertiban & ketentraman



Penyelarasan interaksi kepentingan



Pengaturan



Aturan hukum

Aturan hukum

dibutuhkan



Jaminan pentaatan

dibutuhkan



Sanksi

- Secara umum , bentuk sanksi adl berupa **“pelimpahan rasa ketidak enakan masyarakat (nestapa) spy dpt dirasakan jg penderitaan / kerugian yg dialami”** yg disebut dg istilah **“pidana”**



- Aturan-aturan hukum yg memuat sanksi pidana → disebut dg **“Hukum Pidana”**

Pelanggaran



Kerugian

terhadap

Kep. org banyak / kepentingan umum
secara obyektif



Hukum pidana → Hukum **Publik**

Tujuan Hukum Pidana (Abd. Jamali, 2000):

1. Sbg sarana **preventif**
2. Sbg sarana **kuratif**

Pembagian Hk Pidana

Hk Pidana Obyektif
(*ius poenale*)

Hk Pidana Subyektif
(*ius poeniendi*)

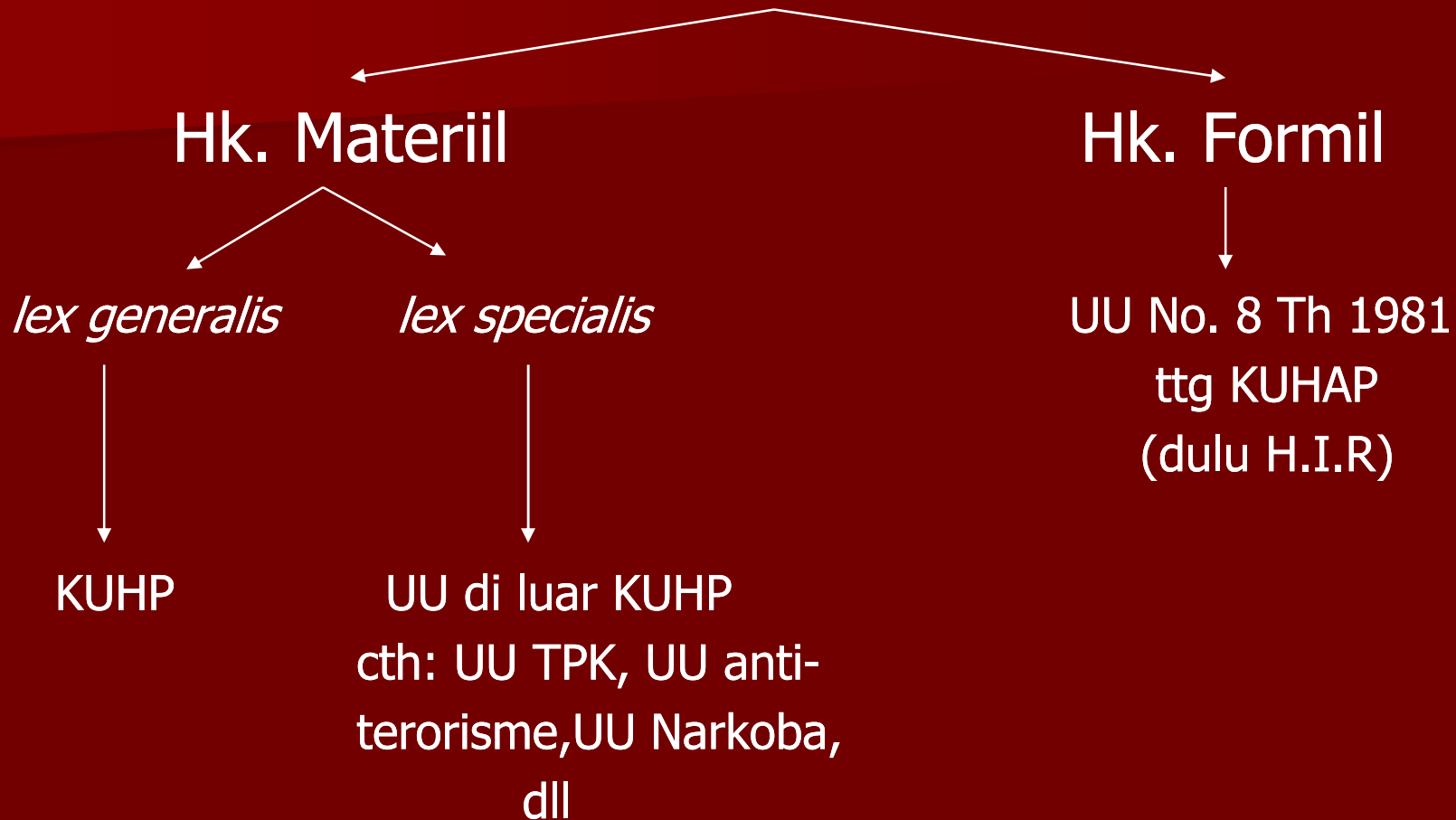
Hk Pid. Materiil

Hk Pid. Formil

Ket:

- Hk. Pidana Materiil → aturan hk. yg mengatur ttg macam-macam perbuatan pidana & sangksi pidananya
- Hk. Pidana Formil → aturan hk. Yg mengatur ttg tata cara / prosedur penegakan hk. pidana materiil
- Hk. Pidana Subyektif → mengatur ttg tata cara bgm negara memberi hukuman pada pelaku → hak negara untuk:
 1. memberi ancaman hukuman
 2. hak jaksa
 3. hak hakim

Hukum Pidana Indonesia



Sejarah KUHP



* Berlaku untuk seluruh penduduk Hindia Belanda

Sistematika KUHP

- Buku I: Aturan Umum (psl 1- 103)
→ ttg pengertian dan asas-asas hukum pidana positif pd umumnya

- Buku II : Kejahatan

- Buku III : Pelanggaran

Dibedakan berdasarkan berat ringannya hukuman

Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana dlm Per-UU-an

- Asas Legalitas → psl 1 (1)
 - Aturan pidana harus dlm bentuk UU (&atau perda → psl 14 UU 10/04)
 - Suatu perbuatan dpt dikatakan sbg tindak pidana **hny** jk sebelumnya tih diatur oleh UU
 - Tidak boleh adanya analogi (sbg gantinya →interpretasi ekstentif / yg diperluas)
 - Non retro aktif (tdk bs berlaku surut)

■ Asas Teritorial → psl 2 & 3

-Pasal 2:

→ penekanan pd teritori atau wilayah

→ Hk pidana Indonesia berlaku di wil.Indonesia bg semua org (WNI / WNA)

-Pasal 3 jo UU No.4 th 1976:

→ Bukan perluasan psl 2, ttp perluasan yuridiksi Indonesia

→ Hk pidana Indonesia berlaku di kapal&pesawat berbendera Indonesia bg semua org, dimanapun kapal&pesawat itu berada

■ Asas nasional aktif / asas personalitas →psl 5

→penekanan pd orang (person)

→UU Pidana Indonesia mengikuti **WNI di luar negeri**, dg dibatasi pd **kejahatan tertentu**. Meliputi:

a. Pasal 5(1) ke-1:

1. kej thd keamanan neg (Buku II bab I KUHP)
2. kej thd kedudukan kepala neg (Buku II bab II kUHP)
3. kej penghasutan utk melakukan tindak pidana (psl 160-161 KUHP)
4. kejahatan tdk memenuhi kewajiban bela negara (psl 240 KUHP)
5. kejahatan melakukan pelanggaran halangan perkawinan (psl 279 KUHP)
6. kejahatan pembajakan (psl 450-451 KUHP)

b. Pasal 5 (1) ke-2:

→ semua kejahatan menurut hk pidana Indonesia yg **sekaligus** merupakan tindak pidana menurut hk pidana di negara y.b.s

→ tidak bisa dikenakan hukuman mati jk menurut hk pidana di negara y.b.s tdk diancam hukuman mati (pasal 6 KUHP)

Pasal 5 (2):

→ mencegah upaya naturalisasi org asing pelaku tindak pidana di luar negeri.

■ Asas nasional pasif

→ penekanan pd perlindungan kepentingan negara RI

-Pasal 4

→ UU Hk Pidana Indonesia berlaku bagi **semua orang di luar wil Indonesia** dg dibatasi pd **tindak pidana tertentu**:

1. Kej thd keamanan negara (Buku II bab I) dan kej thd kedudukan kepala negara (Buku II bab II) yg berat, yakni yg meliputi psl: 104, 106, 107, 108, 110, 111bis (1), 127, & 131 KUHP → psl 4 ke-1
2. Kej ttg mata uang / uang kertas negara / uang kertas bank atau ttg materai / merk yg dikeluarkan pemerintah Indonesia → psl 4 ke-2
3. Kej pemalsuan dlm surat-surat utang / sertifikat utang atas tanggungan Indonesia, dst → psl 4 ke-3

-Pasal 8

→Utk melindungi kepentingan pelayaran Indonesia

→UU hk pidana Indonesia berlaku bg **nahkoda & penumpang** kapal Indonesia di luar Indonesia sekalipun sdg berada di luar kapal atas tindak pidana tertentu, yakni:

1. Kejahatan pelayaran (Buku II bab XXIX KUHP)
2. Pelanggaran pelayaran (Buku III bab IX KUHP)
3. Tindak pidana yg diatur dlm peraturan umum ttg surat laut dan pas kapal di Indonesia & di dlm Ordonansi Kapal 1927

■ Asas Universalitas → psl 4 ke-4

→ melindungi kepentingan hub antar negara

→ UU hk pidana Indonesia berlaku bg semua org di luar wil Indonesia utk kejahatan pembajakan (psl 438, 444-447 KUHP)

■ Pasal 7

→ penekanan pd pejabat RI di luar negeri

→ UU Hk Pidana Indonesia berlaku bg **semua pejabat Indonesia** yg di melakukan **kejahatan jabatan** (Buku II bab XXVIII KUHP)

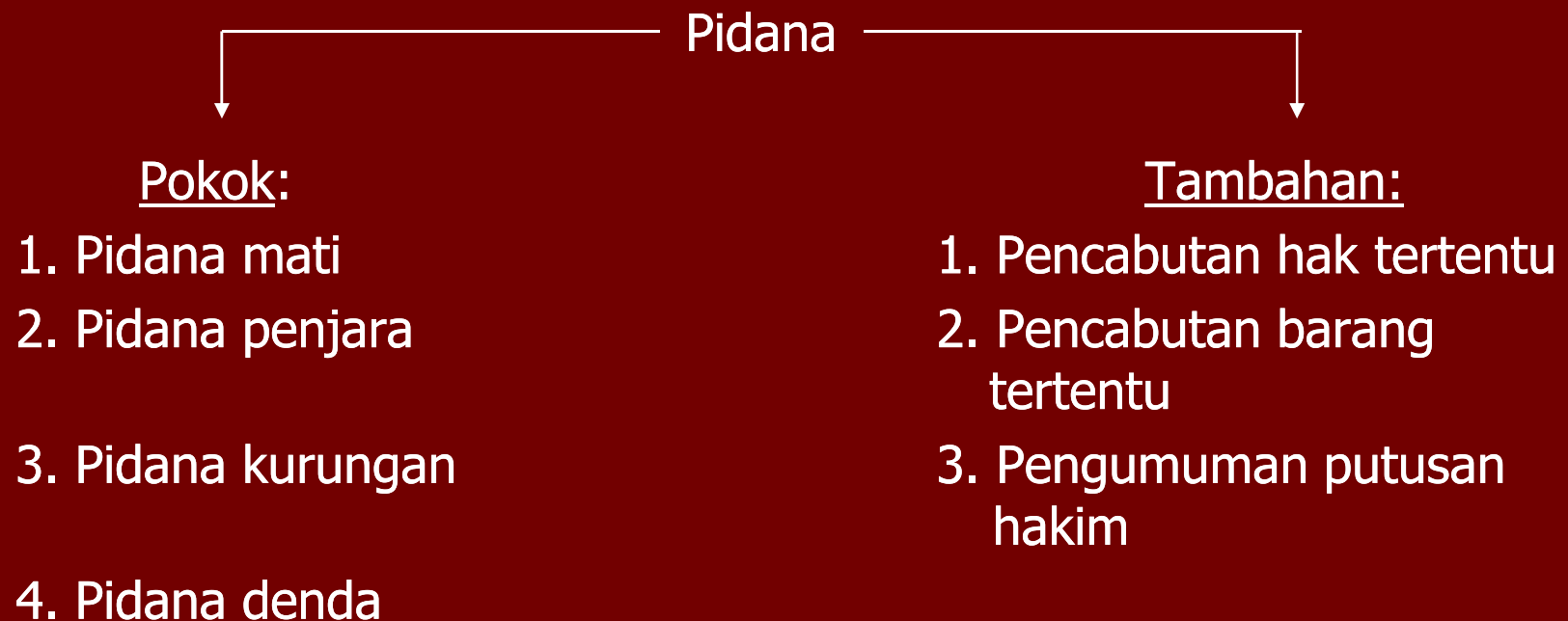
■ Pasal 9

→ **Membatasi** keberlakuan **pasal 2-5,7, & 8 KUHP** di atas oleh **pengecualian-pengecualian ml Hukum Internasional**

→ cth: Dubes, rumah&pekarangan Dubes

Sistem Pemidanaan

■ Pasal 10 KUHP:



- Pidana Mati

→ hukuman gantung oleh algojo (psl 11 KUHP) diganti dg hukuman tembak (psl 1 STB 1945 : 123)

- Penjara (psl 12 KUHP)

1. Seumur hidup

2. Waktu tertentu

-min 1 hari, max 15 thn

-bisa max 20 thn tp dg catatan → ayat 3

- Kurungan (psl 18 KUHP)
→ min 1 hari, max 1th 4 bln
- Denda (psl 30-33 KUHP)
→ bisa dibayar oleh siapa saja, tdk harus terpidana

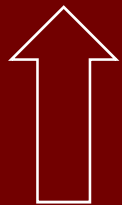
- UU No 20 th 1946

“Pidana Tutupan”

→ sebagai pengganti pidana penjara,
diperuntukkan bg **orang yg dihormati**
spt : mantan presiden

Peristiwa / Tindak Pidana (delik)

Hukum pidana → aturan hukum yg memuat
sanksi pidana



Perbuatan → **Tindak Pidana**
melawan hk

- Perbuatan / Peristiwa / Tindak pidana :
→ perbuatan yg diancam dg sanksi pidana
mll suatu aturan hukum (UU)

2 Aspek Peristiwa / Tindak Pidana:

- Aspek obyektif → perbuatan
- Aspek subyektif → pelaku

menghasilkan



Syarat-syarat **peristiwa pidana yg dpt**
dipidana
(*strafbaar feit*)

Syarat-Syarat *Strafbaar Feit*:

1. Ada perbuatan
2. Perbuatan tsb sesuai dg isi aturan hukum
3. Perbuatan tsb **bersifat melawan hukum**
(bertentangan dg ketentuan dlm aturan hukum pidana yg ada):
 - Kejahatan
 - Pelanggaran
4. Perbuatan tsb hrs diancam sanksi pidana:
 - Berat → mati / penjara → kejahatan
 - Ringan → kurungan / denda → pelanggaran
5. Dlm perbuatan tsb hrs ada **kesalahan yg dpt dipertanggung jawabkan**

Ket: 1-4 → syarat perbuatan pidana (*criminal act*)

1-5 → syarat pemidanaan (*criminal responsibility*)

Shg, seseorang dpt **dipidana** adl
hanya jika:

- Melakukan perbuatan melanggar aturan hukum pidana / perbuatan pidana (*criminal act*) **DAN**
- Terdapat unsur pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*)

SYARAT PIDANA

Criminal Act
(perbuatan pidana)

***Criminal
Responsibility***



Schuld (kesalahan)

- Ke-2 unsur di atas harus **kumulatif !**
→ asas *gen straf zonder schuld*

?

- Bisakah ada ***Criminal Act*** ttp tdk ada ***Criminal Responsibility***?

Alasan Penghapusan Pidana (dlm aturan umum KUHP):

- **Alasan Pembenaar**
- **Alasan Pemaaf**

■ Alasan **Pembenar**:

Alasan yg menghapuskan **sifat melawan hk** nya perbuatan, shg apa yg dilakukan oleh terdakwa mjd perbuatan yg patut dan benar

ex: -psl 44 (1) KUHP

-psl 48 KUHP

-psl 49 (1) KUHP

-psl 50 KUHP

-psl 51 (1) KUHP

■ Alasan Pemaaf:

Alasan yg menghapuskan kesalahan terdakwa

ex: -psl 48 KUHP

-psl 49 (2) KUHP

-psl 51 (2) KUHP

Aturan Penutup (psl 103)

- Asas-asas umum dalam KUHP (ketentuan-ketentuan dalam Buku I KUHP) juga berlaku bagi UU pidana khusus kecuali ditentukan lain oleh UU khusus tersebut.

Sekian & Terima Kasih

“Menuju Revolusi Bangsa Indonesia”

Pengantar Hukum Pidana
Joeni Arianto Kurniawan, S.H.